

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN INVESTASI DIREKSI PT

PERTAMINA (PERSERO) DALAM PERSPEKTIF *BUSINESS*

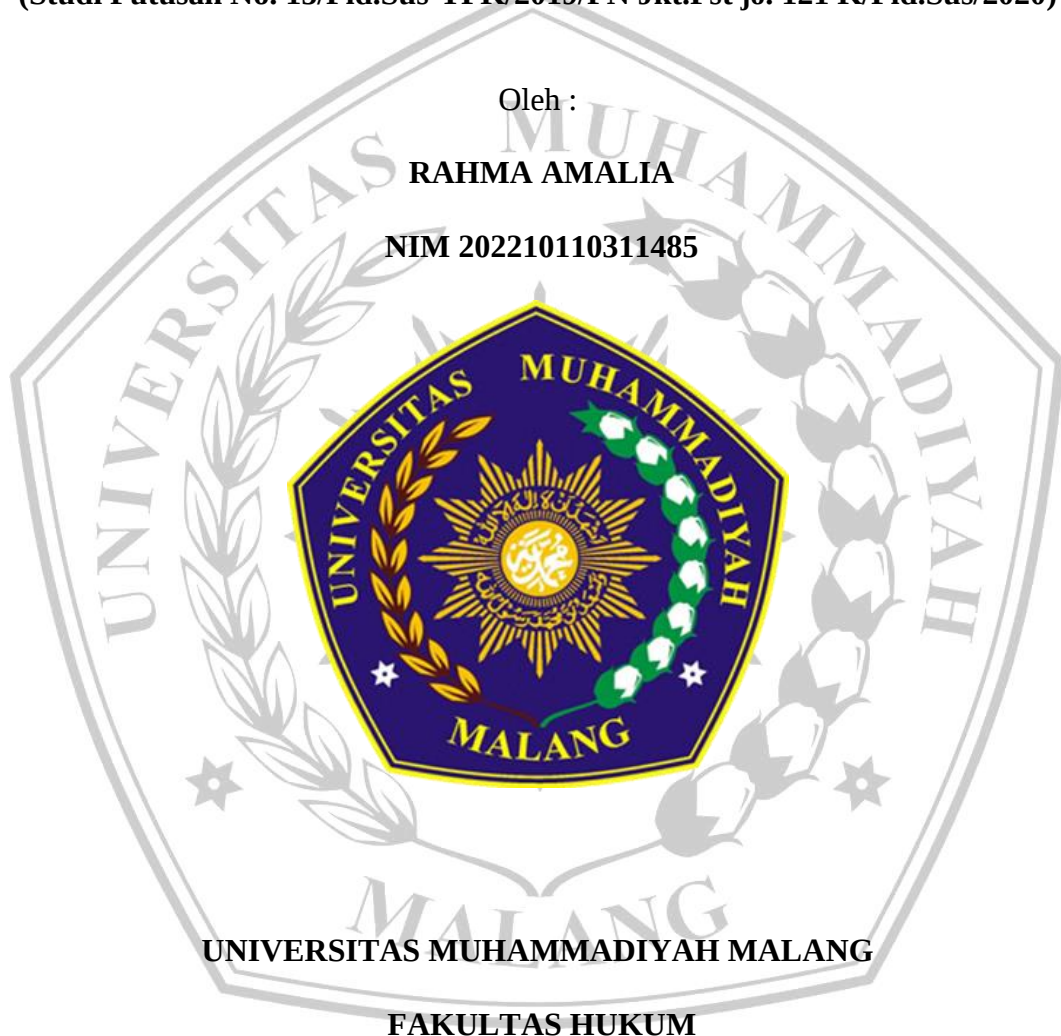
***JUDGMENT RULE* PADA HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA**

(Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. 121 K/Pid.Sus/2020)

Oleh :

RAHMA AMALIA

NIM 202210110311485



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311485
Rahma Amalia
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN INVESTASI DIREKSI PT PERTAMINA
(PERSERO) DALAM PERSPEKTIF BUSINESS JUDGMENT RULE PADA
HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO.15/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST JO. 121
K/PID.SUS/2020)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
RAHMA AMALIA
NIM: 202210110311485

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN INVESTASI DIREKSI PT PERTAMINA
(PERSERO) DALAM PERSPEKTIF BUSINESS JUDGMENT RULE PADA
HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO.15/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST JO. 121
K/PID.SUS/2020)**

Diajukan Oleh:

RAHMA AMALIA

202210110311485

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 27 Juni 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RAHMA AMALIA

202210110311485

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 27 Juni 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, S.H., MKn



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAHMA AMALIA

NIM : 202210110311485

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN INVESTASI DIREKSI PT PERTAMINA
(PERSERO) DALAM PERSPEKTIF BUSINESS JUDGMENT RULE PADA
HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO.15/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST JO. 121
K/PID.SUS/2020)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


132F9AKX066467078
METERAI
TEMPEL

, 08 Juli 2026

Rahma Amalia

ABSTRAKSI

Nama : Rahma Amalia
NIM : 202210110311485
Judul : Analisis Yuridis Keputusan Investasi Direksi PT Pertamina (Persero) dalam Perspektif *Business Judgment Rule* pada Hukum Perseroan di Indonesia (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. No. 121 K/Pid.Sus/2020)
Pembimbing : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Karakteristik keputusan investasi direksi dalam akuisisi *participating interest* Blok Basker Manta Gummy (BMG) oleh PT Pertamina (Persero) menimbulkan perdebatan mengenai batas antara risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 serta mengkaji kesesuaian penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam membedakan risiko bisnis dan pertanggungjawaban hukum direksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pertimbangan antara hakim tingkat pertama dan Mahkamah Agung. Pada tingkat pertama, penilaian lebih difokuskan pada kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan prosedural, sedangkan Mahkamah Agung menilai bahwa keputusan investasi tersebut merupakan keputusan bisnis yang diambil dalam rangka kepentingan perseroan, tanpa adanya benturan kepentingan maupun keuntungan pribadi. Putusan kasasi juga menegaskan bahwa kerugian yang timbul merupakan konsekuensi risiko bisnis yang melekat pada kegiatan investasi sehingga tidak dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana pribadi direksi. Dengan demikian, penerapan *Business Judgment Rule* dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 memperkuat perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perseroan. Dan oleh karena itu, diperlukan parameter yang jelas mengenai batas antara risiko bisnis dan tanggung jawab hukum direksi guna menjamin kepastian hukum serta konsistensi penerapan *Business Judgment Rule* dalam praktik peradilan di Indonesia.

Kata kunci: **Business Judgment Rule, Pertanggungjawaban Direksi, Risiko Bisnis.**

ABSTRACT

Name : **Rahma Amalia**
NIM : **202210110311485**
Title : ***Juridical Analysis of the Investment Decision of the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) from the Perspective of the Business Judgment Rule in Indonesian Company Law (A Study of Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst in conjunction with Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020)***
Adviser : **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si**
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

The nature of the board of directors' investment decision regarding PT Pertamina (Persero)'s acquisition of a participating interest in the Basker Manta Gummy (BMG) Block has sparked debate concerning the boundary between legitimate business risk and the legal liability of directors. This study aims to analyze the judicial reasoning in Judgment Number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst (in conjunction with Judgment Number 121 K/Pid.Sus/2020) and to examine the appropriateness of applying the Business Judgment Rule to distinguish between business risk and directors' legal liability. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches, with qualitative analysis. The findings reveal a disparity in reasoning between the court of first instance and the Supreme Court. At the first instance level, the assessment focused primarily on state financial losses and alleged procedural irregularities; conversely, the Supreme Court determined that the investment decision was a business decision made in the company's interest, devoid of conflicts of interest or personal gain. The cassation judgment further affirmed that the resulting losses were a consequence of business risks inherent in investment activities and, therefore, could not be attributed to the directors as personal criminal liability. Thus, the application of the Business Judgment Rule in Judgment Number 121 K/Pid.Sus/2020 reinforces legal protection for directors who act in good faith, with due care, and in the best interests of the company. Consequently, clear parameters defining the boundary between business risk and directors' legal liability are essential to ensure legal certainty and consistency in the application of the Business Judgment Rule within Indonesian judicial practice.

Keywords: ***Business Judgment Rule, Directors' Liability, Business Risk.***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN INVESTASI DIREKSI PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PERSPEKTIF *BUSINESS JUDGMENT RULE* PADA HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. No. 121 K/Pid.Sus/2020)” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, tenaga, serta pemikiran yang mendalam. Banyak hambatan, tantangan, serta proses revisi yang harus dilalui selama penyusunan karya ilmiah ini. Namun demikian, dengan adanya usaha, kesungguhan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Menyelesaikan skripsi ini juga menjadi pengalaman akademik yang sangat berharga bagi penulis. Selain sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir perkuliahan, proses ini memberikan banyak pembelajaran, khususnya dalam hal kedisiplinan, ketelitian, serta kemampuan menganalisis suatu permasalahan hukum secara yuridis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perseroan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibunda tercinta Lilik dan Ayahanda Ngationo, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, perhatian, serta saran yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.

8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, termasuk Bapak dan Ibu dosen, instruktur, serta asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, bimbingan, motivasi, serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Sahabat, teman-teman seperjuangan, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perseroan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Malang, 23 Juni 2026

Rahma Amalia

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iv
Abstraksi.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	15
F. METODE PENELITIAN.....	17
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	24
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 26
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	37
C. Tinjauan Umum tentang Akuisisi.....	44
D. Tinjauan Umum tentang Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	50
E. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	57
F. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	61
 BAB III PEMBAHASAN.....	 66

A.	Duduk Perkara	66
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menilai Keputusan Investasi Direksi PT Pertamina (Persero) atas Akuisisi <i>Participating Interest</i> Blok BMG	69
1.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus TPK/2019/PN Jkt.Pst terkait Keputusan Investasi Akuisisi <i>Participating Interest</i> Blok BMG	69
2.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI terkait Keputusan Investasi Akuisisi <i>Participating Interest</i> Blok BMG	76
3.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 terkait Keputusan Investasi Akuisisi <i>Participating Interest</i> Blok BMG	79
C.	Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> terhadap Keputusan Investasi PT Pertamina (Persero) dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020	82
1.	Analisis Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Berdasarkan Hukum Perseroan di Indonesia	82
2.	Analisis Batasan antara Risiko Bisnis yang Wajar dan Tanggung Jawab Hukum Direksi	96
BAB IV PENUTUP		102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		105
DAFTAR LAMPIRAN		111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas.....	111
Lampiran 2 : Kartu Kendali.....	112



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, S. H. (2015). Buku pintar hukum perseroan terbatas. Raih Asa Sukses.

Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary*.

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Simanjuntak, C. (2009). *Organ Perseroan Terbatas*.

Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media.

Untung, H. B., & SH, C. (2020). *Hukum akuisisi*. Penerbit Andi.

Internet:

<https://news.detik.com/berita/d-6940697/karen-agustiawan-lepas-di-kasus-rp-568-m-kini-tersangka-korupsi-rp-2-1-t> (diakses pada 20 April 2026)

Jurnal:

Ajebi, A. (2022). *Penerapan Doktrin Business Judgement rule terhadap direksi BUMN perspektif UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Ekonomi Syariah: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid. Sus/2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.

Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya, 1(1).

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Budianty, R. A. (2012). *Tinjauan Yuridis terhadap Prinsip Kehathatian Direksi dalam Perjanjian Kerja Sama untuk Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Penelitian PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.
- Dewi, P. Y. K., & Suryantini, N. P. S. (2018). *Analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.
- Dwijowijoto, R. N., & Wrihatnolo, R. R. (2008). *Manajemen privatisasi BUMN*. Elex Media Komputindo.
- Fathyah, N., Murtinah, T. S., & Sari, N. (2019). Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara di Perusahaan Umum (Perum)(Studi pada Perum Perhutani). *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*.
- Fikriya, T. N. (2020). Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara. *Lex Renaissance*, 5(3), 592-606.

- Gustina, I. (2017). Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan yang go public yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *PKM Maju Uda*, 2(1), 20-34.
- Harahap, P. S., & Tumanggor, T. (2015). Penerapan asas piercing the corporate veil: Perspektif tanggung jawab direksi perseroan terbatas. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1(1), 45-51.
- Hendarto, D. H. (2021). Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korupsi Karen Agustiawan (Studi Kasus Putusan No. 15 K/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn Jkt. Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 125-131.
- Isfardiyana, S. H. (2014). Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan. *Arena Hukum*, 7(2), 151-171.
- Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 1-20.
- Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 1-20.
- Istighfarin, D., & Wirawati, N. G. P. (2015). Pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(2), 564-581.

- Iswi Hariyani, S. H. (2011). *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*. Visimedia.
- Januarsyah, M. P. Z., Priyatno, D., Winata, A. S., & Hidayat, K. (2022). Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 143.
- Kurniati, M., & Asmirawati, A. (2022). Efek merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan go public. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(1), 72-84.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324-346.
- Lestari, T., & Mutmainah, K. (2020). Pengaruh karakteristik dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja keuangan. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 34-41.
- Marsella, M. (2016). Benturan Kepentingan Tidak Langsung Oleh Direktur Dalam Mengelola Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(1), 23-39.
- Mutmainah, S. (2023). *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))*.

- Nurhasanah, S. R. P., & Afwa, U. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada Holding Company BUMN. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 303-317.
- Pakendek, A. (2019). Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1).
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940-950.
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum perseroan terbatas dan perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, 1(03).
- Pramesti, A. A., & Nita, R. A. (2022). Pengaruh diversitas dewan direksi terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(2), 188-198.
- Purnomo, H. (2022). Dissecting The Case Of Karen Agustiawan (Former President Director Of Pt. Pertamina) Through Analysis Of The Teaching Of Causality. *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi*, 1(01), 54-63.
- Raffles, R. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107-137.
- Rahadiyan, I. (2013). Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 624-640.

- Rahadiyan, I. (2013). Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 624-640.
- Rambling, N. (2013). Syarat-syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 156072.
- Sari, M. A. (2018). *Konsep business judgement rule pada Badan Usaha Milik Negara (Putusan No. 41 PK/Pid. Sus/2015)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sesara, G. W. (2020). Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 32.
- Setiawati, A. D., & Vitrana, M. G. (2025). Doktrin business judgement rule dalam UU BUMN: Batas tanggung jawab direksi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechtens*, 14(1), 167.
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12-16.
- Silvana, E. D., & Wicaksana, A. (2022). Tanggung Jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), 1255-1268.
- Subekti, T. (2008). Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 21-28.
- Sugiyono, D. (2022). Metode penelitian kualitatif.

- Syahrani, N. (2024). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Direksi Korporasi Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pt. Pertamina Dengan Pt. Asuransi Jiwasraya). *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 28-38.
- Tetuko, W. H., & Adam, R. C. (2022). Penerapan doktrin business judgment rule terhadap direksi anak perusahaan BUMN (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid. Sus/2020). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 777-800.
- Ulum, H. K., & Yudanto, A. A. (2022). Mengukur Kinerja dan Risiko Keuangan BUMN Sub-Klaster Minyak dan Gas. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 6(1), 90-103.
- Vanya, I. (2026). Penafsiran Konstitusi Terhadap Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Melaksanakan Hak Menguasai Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 49-66.
- Wardhana, G. P. (2019). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 14(1), 59-60.
- Yuwono, M. Y. (2015). Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. *Notarius*, 8(2), 207-235.

Golden Tiket

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rahma Amalia

Nim : 202210110311485

LOLOS
PLAGIASI

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Yuridis Keputusan Investasi Direksi PT Pertamina
(Persero) dalam Perspektif Business Judgment Rule pada Hukum
Perseroan di Indonesia
(Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. No. 121
K/Pid.Sus/2020)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juni 2026



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

